

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENANGANAN STUNTING BERBASIS MODAL SOSIAL DI DESA BILEBANTE, LOMBOK TENGAH

VILLAGE GOVERNMENT STRATEGY IN HANDLING SOCIAL CAPITAL BASED STUNTING IN BILEBANTE VILLAGE, CENTRAL LOMBOK

Saipul Hamdi^{1*}, Dewi Satria Elmiana², Ikmal Maulana³, Nurul Haromain⁴,
Ihfan Rahmawadi⁵, Firdaus Abdul Malik⁶

¹⁻⁶Universitas Mataram

Jl. Majapahit, No. 62, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

e-mail: shamdi@unram.ac.id

Diserahkan: 19/09/2023, Diperbaiki: 10/11/2023, Disetujui: 14/11/2023

DOI: 10.47441/jkp.v18i2.346

Abstrak

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan linear dalam status gizi rendah yang dapat diartikan sebagai kondisi pada seseorang dengan tubuh pendek atau sangat pendek karena malnutrisi. Prevalensi stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) naik dari 31,4% pada tahun 2021 menjadi 32,7% pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi yang dikembangkan pemerintah desa di Bilebante dalam mengatasi permasalahan stunting, yang mana Desa Bilebante, Lombok Tengah, yang mana sukses dalam mengembangkan program kampung Keluarga Berencana yang erat kaitannya dengan pengendalian pola hidup sehat dan manajemen keluarga di masyarakatnya. Penelitian ini juga melakukan stakeholder mapping dan pemetaan modal sosial untuk menemukan formulasi kebijakan yang tepat dalam mengatasi isu stunting di NTB, sehingga dapat dihasilkan suatu rekomendasi kebijakan yang dapat di replikasi pada sejumlah desa lainnya yang ada di wilayah provinsi NTB. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan (Juni-Agustus 2023) dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara mendalam, *focus group discussion* (FGD) dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi, pemerintah desa, bidan desa, kader posyandu, karang taruna, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), tokoh adat, ibu hamil, ibu bayi dua tahun, dan masyarakat lokal lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elaborasi kebijakan dan penguatan modal sosial oleh pemerintah Desa Bilebante dapat mendorong percepatan pembangunan di berbagai bidang. Sikap masyarakat yang kolaboratif dan peran aktif dari berbagai stakeholder mengantarkan Desa Bilebante berhasil menekan angka stunting secara signifikan dalam tiga tahun jalannya program.

Kata Kunci: *Stunting, Pemerintah Desa, Kebijakan, Modal Sosial, Bilebante*

Abstract

Stunting is a low nutritional status linear growth problem defined as a condition in which a person has a short or very short body due to malnutrition. Stunting increased from 31.4% in 2021 to 32.7% in 2022 in West Nusa Tenggara (NTB) Province. The current study intends to look into the stunting prevention techniques implemented by the village authority in Bilebante. Bilebante Village in Central Lombok has effectively built a family planning village program strongly linked to community control of healthy lifestyles and family management. The study lasted three months (June-August 2023) and included qualitative methods from a phenomenological standpoint. The findings suggest that policy development and social capital building by the Bilebante Village government can accelerate growth in a range of disciplines. The collaborative attitude of the community and the active participation of multiple stakeholders enabled Bilebante Village to reduce stunting rates significantly over the program's three years..

Keywords: *Stunting, Village Government, Policy, Social Capital, Bilebante*

PENDAHULUAN

Stunting merupakan suatu kondisi dimana balita dinyatakan memiliki panjang atau tinggi yang lebih pendek dibandingkan dengan umur atau tidak sesuai dengan umur. Kondisi tersebut diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi *stunting* baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun (Harau 2015; Kementerian Kesehatan 2022). *Stunting* memiliki nilai z-skor kurang dari -2 SD/standar deviasi (*stunted*) dan kurang dari -3 SD (*severely stunted*) (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2017). Berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, *stunting* menjadi isu prioritas pembangunan nasional yang ditargetkan dapat diturunkan angka prevalensinya hingga 14% di tahun 2024. Hal ini didorong dengan memaksimalkan pelibatan lintas sektor mulai dari tingkat pusat hingga daerah di Indonesia (Ketut Aryastami and Tarigan 2017; Ipan, Purnamasari, and Priyanti 2021).

Masalah *stunting* telah dirasakan di seluruh wilayah Indonesia dan telah diberikan perhatian sebagai isu utama pada bidang kesehatan yang membutuhkan percepatan penyelesaian. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu daerah yang memiliki prevalensi *stunting* tertinggi ke empat di Indonesia, yaitu sebesar 32,7% setelah Provinsi Papua sebesar 34,6% (Irwansyah, Ismail, and Hakimi 2016; Nurhayati et al. 2020). Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi *stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Barat naik dari 31,4 persen pada tahun 2021 menjadi 32,7 persen pada tahun 2022. Peningkatan prevalensi *stunting* tersebut jauh di atas angka rata-rata nasional. Angka tersebut lebih tinggi dari angka rata-rata nasional (21,6 %) dan di atas ambang batas WHO (<20 %) dan masih jauh dari target nasional, yaitu sebesar 14 persen di tahun 2024 (Wardani et al. 2021; Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI 2020; Widiyanty, Saimi, and Khalik 2021; Nurbaiti et al. 2021). Rumusan kebijakan baru berkaitan dengan pengembangan model aksi penurunan angka *stunting* menjadi penting untuk dilakukan, tentunya dengan melakukan kajian kritis terhadap pola kehidupan masyarakat yang dihubungkan dengan modal sosial dan potensi lainnya di lapangan yang dapat dijadikan sebagai media intervensi dalam penekanan angka *stunting* di Nusa Tenggara Barat.

Persoalan tidak terpenuhinya standar gizi pada anak tidak terbatas pada faktor ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan gizi anak, melainkan terdapat faktor-faktor lain yang lebih kompleks yang menyebabkan *stunting* di kehidupan masyarakat masih banyak terjadi. Salah satunya terkait dengan kebudayaan menyangkut pola asuh anak yang tidak menunjang terpenuhinya standar gizi untuk anak (Sari et al., 2020). Berdasarkan rilis hasil rapat koordinasi lintas sektor percepatan penanganan *stunting* di NTB tahun 2022 menyebutkan bahwa, faktor utama penyebab terjadinya *stunting* di NTB disebabkan oleh tingginya angka pernikahan usia anak yang berdampak terhadap kegagalan pada polas asuh anak dan kurangnya akses sanitasi dan air bersih di sejumlah kawasan di NTB. Nurhandini Eka Dewi dalam Harian Radar Lombok (2023) menyebutkan bahwa kasus perkawinan usia anak di NTB masih tinggi, tercatat sebanyak 1.837 anak mengajukan dispensasi nikah sepanjang tahun 2021-2022 di 10 kabupaten/Kota di NTB. Selain itu, sebanyak 35 Desa di 20 Kecamatan di NTB mengalami krisis air bersih setiap tahunnya (Lombok Post 2023).

Riset tentang penanganan masalah *stunting* di NTB masih sangat minim dilakukan. Sebagian besar penelitian yang telah dilakukan hanya membahas mengenai fenomena *stunting* dengan berbagai macam faktor penyebab dan upaya penanganan *stunting* yang dikembangkan dari aspek kesehatan atau asupan gizi anak. Para peneliti sebelumnya seperti, Imawanto, Lelisari, Siti Nurjannah (2021) dan Nurhayati et al. (2020). fokus pada penyuluhan gizi dan pelatihan pengolahan produk berbasis jagung sebagai upaya meminimalisir *stunting*. Wardani et al. (2021) dan Maliga et al. (2022) menulis tentang pengaruh indeks risiko sanitasi terhadap kejadian *stunting*. Nirmalasari (2020), Fitriani et

al. (2022), Irwansyah, Ismail, dan Hakimi (2016) menulis tentang kehamilan remaja dan kejadian *stunting* pada anak. Yuana, Larasati, dan Berawi (2021), Yusuf (2022), dan Susilawati dan Ginting (2023) menulis tentang faktor risiko balita *stunting* pada usia 12-36 bulan. Melihat beberapa tulisan tersebut tidak ada yang membahas secara spesifik tentang tentang muatan modal sosial yang dimiliki masyarakat NTB sebagai potensi strategis dalam mengatasi permasalahan *stunting*.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus berupaya melakukan percepatan penanganan *stunting*. Salah satu strategi unggulan yang dikembangkan adalah dengan membentuk Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang meliputi lima pilar utama, yaitu berhenti buang air sembarangan, cuci tangan pakai sabun di air mengalir, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga, dan pengamanan limbah cair rumah tangga (Kompas 2023; Nurbaiti et al. 2021; Widiyanti, Saimi, dan Khalik 2021; Luthfiah dan Wirawan 2020; Maad dan Anugrahini 2022). Kebijakan pemerintah ini sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat terhadap program-program yang diberikan, sehingga dibutuhkan pengkajian secara kritis untuk menemukan pendekatan yang efektif dalam menciptakan kesadaran di masyarakat terkait penanganan *stunting*. Berangkat dari persoalan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi yang dikembangkan pemerintah desa dalam menangani masalah *stunting* di Desa Bilebante, Lombok Tengah.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Desain ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi strategi yang dikembangkan pemerintah desa dalam penanganan masalah *stunting* di Desa Bilebante, Lombok Tengah. Penelitian ini juga menerapkan triangulasi data dengan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metoda dan sumber perolehan data (Sugiyono 2006).

Penelitian ini dilakukan di Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Desa tersebut merupakan desa yang berhasil menerapkan program berbasis modal sosial untuk penanganan *stunting* bagi masyarakatnya. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan (Juni-Agustus 2023) dengan teknik pengambilan data melalui kegiatan observasi, wawancara mendalam, *focus group discussion* (FGD) dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini mencakup 7 informan kunci yang terdiri dari pemerintah desa, bidan desa, kader posyandu/pkk, karang taruna, pokdarwis, tokoh adat, ibu hamil, ibu bayi dua tahun, dan masyarakat lokal. Selanjutnya teknik analisis data untuk penelitian ini adalah analisis kualitatif untuk mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat Bilebante tentang Stunting

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan linear dalam status gizi rendah yang dapat diartikan sebagai kondisi pada seseorang dengan tubuh pendek atau sangat pendek karena malnutrisi (Nasikhah dan Margawati 2012; Wardani et al. 2021; Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI 2020; Khairani 2020; Haskas 2020). Menurut Aryastami (2017) *stunting* adalah masalah gizi buruk yang disebabkan oleh multifaktor dan bersifat lintas generasi. Di sisi lain, sebagian masyarakat Indonesia gagal dalam memahami *stunting* yang menganggap bahwa tumbuh pendek merupakan faktor keturunan semata. *Stunting* yaitu keadaan kekurangan zat gizi kronis pada manusia karena masalah ketidakcukupan gizi dalam kurun waktu lama yang dipengaruhi oleh kandungan makanan tidak sesuai dengan pemenuhan kebutuhan minimal kalori, protein dan nutrisi lainnya (Siregar dan Siagian 2021; Nisa 2018; Teja 2019; Handayani et al. 2023; Oktia, Dokter, dan Bsmi 2020).

Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Istilah Persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami. Menurut William James persepsi terbentuk atas dasar data-data yang kita peroleh dari lingkungan yang diserap oleh indra kita, serta sebagian lainnya diperoleh dari pengolahan ingatan (memori) kita diolah kembali berdasarkan pengalaman yang kita miliki (Lange, Heerdink, dan van Kleef 2022; Prinz dan James 2003; Barrett, Mesquita, dan Gendron 2011). Masyarakat Desa Bilebante memiliki persepsi tentang *stunting* sebagai suatu istilah baru yang mulai berkembang di Masyarakat melalui program-program pemerintah desa dalam menciptakan pola hidup sehat bagi masyarakatnya. Sebelumnya *stunting* dimaknai sebagai fenomena biasa yang berjalan begitu saja, ketidak normalan dalam tumbuh kembang anak dimaknai sebagai hal biasa yang tidak membahayakan sehingga tidak direspon sebagai sebuah masalah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Pokdarwis Desa Bilebante berikut ini:

“Stunting yang kami tau dulu sih orang yang tidak tinggi-tinggi atau yang pendek-pendek gitu, tapi ternyata sekarang stunting itu merupakan penyakit atau masalah yang harus ditangani gitu. Yang penanganannya itu mulai dari masa kehamilan, menyusui, mulai makan, sampai anak itu balita. Ternyata masalah stunting ini waw, penting banget urgen sekali untuk ditangani gitu” (Wawancara tanggal 26 Juli 2023).

Penanganan *stunting* oleh pemerintah desa di Desa Bilebante belum lama dilakukan namun telah berhasil memberikan implikasi positif bagi perkembangan persepsi masyarakat dalam memahami isu *stunting*. Pendekatan sosialisasi yang intensif dan programatik membuat masyarakat teredukasi dan menumbuhkan kesadaran akan bahaya dan pentingnya penanganan *stunting* bagi tumbuh kembang anak-anak mereka. Fenomena ketimpangan pada tumbuh kembang anak sebelumnya sudah ditangani dalam pengertian gizi buruk atau kekurangan gizi pada anak yang kemudian berkembang lebih kompleks dengan munculnya kajian baru dan pengembangan istilah *stunting* yang mencakup persoalan tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Bilebante berikut ini:

“Ini kan program baru stunting ini, baru tiga tahun yang lalu. Yang saya pahami tentang stunting ini adalah kekurangan gizi pada anak yang mengakibatkan dia kurang maksimal terutama ukurannya, berat badan tidak sesuai dengan usia. Itulah gambaran stunting” (wawancara tanggal 26 Juli 2023).

Bahaya yang ditimbulkan akibat *stunting* memiliki efek berantai, yaitu peningkatan risiko kesakitan, kematian, dan gangguan perkembangan otak motorik, sehingga menyebabkan penurunan produktivitas pada waktu yang akan datang. Masalah *stunting* berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia suatu negara yang merupakan aset berharga. Efek negatif yang ditimbulkan berupa rendahnya IQ, lemahnya kognitif, minimnya produktivitas dan meningkatnya risiko penyakit yang mengakibatkan kerugian dalam kurun waktu yang lama bagi kondisi perekonomian Indonesia. Pemahaman akan bahaya *stunting* ini terus bertumbuh di Masyarakat Bilebante sehingga menciptakan kesadaran kolektif pada semua lapisan masyarakat dan stakeholder terkait yang terimplementasi dalam bentuk partisipasi kolaborasi dalam mencegah *stunting* di Desa Bilebante.

Pemetaan *Stakeholder* dan Modal Sosial dalam Penanganan *Stunting* di Bilebante

Stakeholder adalah individu, kelompok, maupun komunitas yang memiliki kepentingan dalam suatu organisasi atau institusi. *Stakeholder* memiliki kemampuan mempengaruhi atau dipengaruhi dari jalannya organisasi atau institusi tersebut. Sementara menurut Freeman, *stakeholders* dipahami sebagai suatu kelompok masyarakat atau juga individu yang saling mempengaruhi juga dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu dari sebuah organisasi. *Stakeholder* dalam kehidupan bermasyarakat berkaitan erat dengan kepentingan pihak-pihak terkait yang menjadikan masyarakat sebagai objek dari jalannya sebuah program yang terancangkan (Saint Ville, Hickey, dan Phillip 2017). Dalam konteks penanganan *stunting* di Desa Bilebante, *stakeholder* yang secara intensif terlibat dalam penanganan *stunting* adalah pemerintah desa dengan perangkatnya meliputi bidan desa, PKK, kader posyandu, dan pokdarwis.

Melalui *stakeholder* inilah masyarakat mulai dikenalkan lebih mendalam terkait isu *stunting*, mulai dari karakteristik dari *stunting* sampai upaya yang dilakukan untuk mencegah dan atau mengatasinya (Nirmalasari 2020; Teja 2019; Ipan, Purnamasari, dan Priyanti 2021). Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ema Rohmania selaku pegiat kepemudaan yang aktif bersosialisasi dengan masyarakat berikut ini:

“Awalnya Stunting lebih sering dengernya di Sosmed sih, cuman untuk lebih dalamnya itu dari temen-temen di wisata sih ya. Karena di wisata ada temen-temen dari PKK, Bidan, kader posyandu. Jadi banyak diskusinya disana dan memang tidak ada yang tau tentang stunting masyarakat disini awalnya. Tapi begitu ada program stunting ini yang lagi gencer-gencernya gitu ya, intens sekali pemerintah desa, PKK, Kader, mendemonstrasikan tentang itu. dan untuk penanganannya saya baru tau pas ada lomba kemarin ini” (wawancara tanggal 29 Juli 2023).

Peran aktif dari *stakeholder* di Desa Bilebante dalam mengatasi permasalahan *stunting* terbukti dari implementasi program yang secara maksimal dilakukan. Penguatan kapasitas kader dan petugas penanganan *stunting* di Desa Bilebante mampu ditindaklanjuti sebagai potensi dalam menjalankan program secara terukur dan edukatif, sehingga masyarakat tidak hanya merasakan program penanganan *stunting* sebagai program formalitas, namun memiliki rencana tindak lanjut secara terprogram. Hal ini dapat dilihat dari capaian program dan skema pelaksanaan program yang optimal dilakukan seperti, jika ada indikasi atau terdeteksinya masyarakat mengalami masalah *stunting* petugas langsung mendampingi individu tersebut dan mengambil tindakan secara intensif untuk membantu, memantau, dan melakukan tindak lanjut untuk penanganan kasus *stunting* tersebut.

“oo ya kalau yang itu kita disini ada kader stunting saya juga bagian dari sana, kita memantau di setiap posyandu itu kita pantau apakah sasarannya itu memiliki stunting atau tidak. Saya sebagai ketua forum kader itu Bersama ibu kades yang juga sebagai bidan desa selalu memantau keadaan masyarakat” (wawancara tanggal 25 Juli 2023).

Adapun kesuksesan program penanganan *stunting* di Desa Bilebante tidak terlepas dari kekuatan modal sosial yang dimiliki masyarakat berupa budaya tutur. Budaya tutur merupakan suatu kebiasaan berbagi cerita dan informasi antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok dalam rutinitas harian kehidupan masyarakat seperti berbelanja di pasar atau tukang sayur, perkumpulan-perkumpulan, momentum perayaan hari-hari besar dan interaksi sosial lainnya (Ciabattari 2007; Putnam 1993). Aktualisasi budaya tutur ini berimplikasi pada kemudahan transfer informasi antar individu yang satu dengan yang lainnya. Masyarakat Desa Bilebante memanfaatkan budaya tutur ini sebagai media pertukaran informasi, salah satu informasi yang dikembangkan terkait masalah *stunting* yang membahayakan bagi tumbuh kembang anak-anak mereka. Biasanya akses

informasi tentang *stunting* ini didapatkan melalui kegiatan posyandu atau sosialisasi dari pemerintah desa, namun dengan kekuatan budaya tutur yang kondusif pada masyarakat Bilebante menjadi faktor pendorong percepatan proses edukasi kepada masyarakat tentang *stunting*. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Pokdarwis Desa Bilebante berikut ini:

“Untuk sumber informasi tentang stunting tentunya dari PKK sih pastinya, Tapi selain itu disini masyarakatnya juga berperan sih karena mereka disini saling ngobrol, saring bertutur. Mau beli sayur ngumpul, buat ini itu ngumpul. Disitu mereka mudah berbagi informasi terkait penanganan stunting yang mereka dapatkan dari sosialisasi PKK. Mereka memiliki kepedulian untuk saling tegur, bertukar cerita tentang hal-hal baru yang mereka ketahui dan yang lainnya terbuka dengan itu. Nah itu saya rasa yang membuat mudah masyarakat tau tentang stunting disini” (wawancara tanggal 26 Juli 2023).

Selain itu masyarakat Bilebante merupakan kelompok yang terbuka. Masyarakat sangat terbuka terhadap informasi dan pengetahuan baru yang belum mereka ketahui. Dalam merespon suatu informasi, masyarakat tidak memandang siapa orang yang menyampaikan informasi dan pengetahuan tersebut, baik itu anak muda, orang tua, perempuan, pemerintah desa, perangkat desa dan karakteristik lainnya, masyarakat tetap menerima dan mendengarkan secara baik pesan apa yang disampaikan kepada mereka. Kepemilikan karakteristik modal sosial seperti inilah yang mendorong Masyarakat Desa Bilebante memiliki semangat kemajuan yang terlihat dari sikap partisipasi yang aktif dan kooperatif dalam mengikuti setiap program dan kebijakan yang ada. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Pokdarwis Desa Bilebante berikut ini:

“Kalau yang aku lihat sih, masyarakat disini itu sangat mendengarkan orang jika dinasehati atau dikasih informasi terkait hal-hal yang mereka belum ketahui. Sehingga siapapun yang berbagi suatu informasi masyarakat sangat terbuka untuk itu, dan tidak hanya didengarkan tapi dipahami dan dijadikan rujukan dalam menjalani kehidupan. Sehingga dalam mengenalkan program-program penanganan stunting, masyarakat justru sangat antusias dan langsung mencoba apa yang diajarkan” (wawancara tanggal 26 juli 2023).

Modal sosial tersebut menjadi salah satu faktor pendorong terciptanya percepatan pembangunan di Desa Bilebante. Sikap masyarakat yang kolaboratif dan peran aktif stakeholder menghantarkan Desa Bilebante berhasil menekan angka *stunting* secara signifikan dalam tiga tahun jalannya program. Sebelumnya angka *stunting* di Desa Bilebante berkisar di angka 23%. Setelah pemberlakuan program penanganan *stunting* per 3 tahun berjalan kasus *stunting* di desa ini di angka 3,15% (Wawancara 19 Juli 2023). Penurunan yang signifikan 3,15% ini merupakan pencapaian yang tinggi jika dinilai berdasarkan target capaian penanganan *stunting* nasional, yaitu sebesar 14%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Desa Bilebante telah mampu dan berhasil mengatasi permasalahan *stunting* dalam tiga tahun jalannya program penanganan *stunting* yang dikembangkan.

Peran Kebijakan dalam Mengedukasi Wawasan Lokalitas untuk Penanganan *Stunting* di Bilebante

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan penanggulangan dan pencegahan *stunting* di Indonesia. Pemerintah sebagai regulator telah membuat beberapa kebijakan yang relevan dalam rangka menyelesaikan permasalahan *stunting*. Sebelum tahun 2014, pemerintah kurang memperhatikan kasus *stunting* di Indonesia. Pemerintah dari tahun 2004 sampai dengan 2014 tidak menyebutkan *stunting* secara spesifik dalam paket kebijakan yang telah disusun, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang *stunting* beserta sebab dan akibatnya (Ipan, Purnamasari, dan Priyanti

2021; Zulkarnaen dan Soesilo 2021). Pemerintah mulai serius menangani stunting di Indonesia pada tahun 2015 yang memasukkan target penurunan prevalensi stunting pada RPJMN 2015-2019. Kebijakan khusus stunting baru ditetapkan pada tahun 2021, yaitu Perpres Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang menggantikan Perpres Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi agar proses penanggulangan penurunan stunting dapat lebih efektif (Almitha dan Atmanti 2022; Raden dan Pramaputri 2021; Rahman, Rahmah, dan Saribulan 2023; Taufiq et al. 2019).

Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar dari legitimasi pemberlakuan program penanganan stunting di masing-masing daerah yang ada di Indonesia dan dikerucutkan sampai ke level desa. Pemerintah desa merupakan pilar utama yang dimandatkan untuk menindaklanjuti penanganan masalah stunting yang ada di tengah-tengah masyarakat. Keberhasilan Desa Bilebante dalam mengatasi stunting tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan strategis pemerintah desa yang mampu mengintegrasikan karakteristik dan modal sosial yang dimiliki masyarakatnya dengan penerapan program-program atau kebijakan dalam memerangi isu stunting pada masyarakatnya.

Penanganan stunting di Indonesia merupakan bagian dari proyek strategis pembangunan nasional dengan target capaian nasional dapat diturunkan pada angka 14% di tahun 2024. Salah satu bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam mengatasi masalah stunting yang ada adalah dengan mengeluarkan kebijakan penganggaran untuk penanganan stunting. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Bilebante berikut ini:

“Anggarannya langsung dari desa yang hampir 60 jutaan anggarannya pertahun. Dan desa yang dari pemerintah pusat dan ADD yang dari pemerintah kabupaten itu dikelola melalui pihak desa untuk posyandu, program stunting dan sebagainya ya dari dana yang dikelola oleh desa. dana itu kan diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Dan yang paling banyak dari persentase itu yang digunakan di Desa Bilebante di sektor kesehatan jadinya yang diperuntukkan untuk kader posyandunya, penanganan stuntingnya, infrastruktur kesehatannya, dan sebagainya. untuk kesehatan hampir 20% dari dana desa” (wawancara tanggal 26 Juli 2023)

Berdasarkan data tersebut, pemerintah desa memiliki peran penting dalam manajemen ketersediaan anggaran secara maksimal untuk mendukung percepatan penanganan stunting di desanya dan terpenuhinya target pembangunan nasional. Pemerintah Desa Bilebante memanfaatkan kebijakan anggaran untuk penanganan stunting dengan membentuk program-program pelayanan dan pelatihan bagi masyarakat khususnya kelompok rentan stunting untuk mengenali, memahami, dan merespon isu stunting yang berkembang di Desanya. Akhirnya, melalui kebijakan anggaran penanganan stunting di Desa Bilebante menciptakan kesadaran kolektif tentang bahaya stunting sehingga terciptanya ketangguhan keluarga terhadap stunting di Desa Bilebante. Berikut ini beberapa strategi praktis yang dikembangkan pemerintah Desa Bilebante untuk penanganan stunting:

Pelatihan Kader Muda Posyandu Muda

Penanganan stunting di Desa Bilebante tidak terlepas dari kapasitas dan kapabilitas pelaksana program. Salah satu ujung tombak yang diberikan atensi oleh pemerintah desa adalah pembentukan kader-kader posyandu muda dengan dilengkapi kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni melalui pelatihan-pelatihan yang diprogramkan. Selanjutnya kader-kader posyandu muda ini secara organik berbaur di lingkungan masyarakat khususnya di kalangan ibu hamil atau kelompok rentan stunting untuk melakukan edukasi dan pemantauan secara intensif di setiap harinya, sehingga hal ini secara otomatis mampu menekan dan meminimalisir peluang indikasi-indikasi lahirnya bayi stunting di Desa Bilebante. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bidan Desa Bilebante berikut ini;

“Kami di Desa tidak sekedar menjalankan program tapi kami benar-bener menyiapkan perangkat untuk mendukung itu seperti peningkatan kapasitas kader-kader muda yang menjadi ujung tombak pengentasan stunting di Desa kami. Semua kader-kader kita latih setelah itu kita sebar di setiap dusun dan membaur bersama masyarakat, kalau ada masalah bisa cepat ditangani begitu” (wawancara tanggal 19 Juli 2023).

Pelatihan Ibu Hamil

Salah satu objek utama program penanganan stunting adalah kalangan ibu hamil. Masa kehamilan adalah masa yang rentan dan penentuan bagaimana kualitas anak yang akan dilahirkan, sehingga memberikan atensi lebih kepada ibu hamil adalah bagian dari upaya objektif dalam pencegahan munculnya stunting. Pemerintah Desa Bilebante memberikan pelatihan kepada ibu hamil tentang cara merawat kehamilannya berbasis pengetahuan atau medis yang dilakukan dalam dua skema, yaitu skema terjadwal bulanan dan *cek point* oleh kader ke tiap-tiap masyarakat yang sedang hamil. Hal tersebut dilakukan untuk membekali dan memastikan para ibu hamil memiliki pemahaman pola hidup sehat di masa kehamilan dan meminimalisir indikasi penyimpangan pola hidup sehat dimasa kehamilan yang merupakan faktor utama penyebab terjadinya stunting. Program pendampingan ini secara aktif dilakukan dan diikuti oleh para ibu hamil di Desa Bilebante karena telah terciptanya kesadaran kolektif akan pentingnya pola hidup sehat untuk tumbuh kembang anak mulai dari masa kehamilan, sehingga melalui skema inilah angka stunting di Desa Bilebante dapat ditekan secara signifikan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Bilebante berikut ini:

“Kami di desa sering mengadakan kegiatan misalnya kegiatan Kelas Ibu Hamil. Kami programkan melalui dana desa agar ibu-ibu hamil itu harus menjaga kehamilannya sejak dia hamil satu bulan, dan diberikan susu dari dana desa agar sesuai umur kehamilan dengan berat badan bayi sampai mereka melahirkan. Jadi sebelum program stunting ini ada, kami sudah membuat program dari dulu. Kemudian sekarang adanya program stunting membuat ada petugas di posyandu yang turun langsung memberikan edukasi kepada ibu-ibu agar mereka dapat memberikan anak-anaknya makanan yang bergizi” (Wawancara 26 Juli 2023).

Pelatihan Pembuatan Menu Makanan Sehat

Setelah melewati masa kehamilan, masa usia nol hingga usia dua tahun merupakan fase yang memiliki kerentanan yang tinggi terhadap stunting. Perhatian pada masa rentan seperti ini menjadi penentu keberhasilan para ibu menciptakan tumbuh kembang anak yang baik, sehingga pemantauan secara intensif terhadap pola asuh anak pada fase ini sangat penting dilakukan khususnya terkait pemenuhan gizi anak. Melihat persoalan tersebut, pemerintah desa bersama pihak kesehatan mengembangkan menu makanan sehat untuk tumbuh kembang anak yang bersumber dari bahan-bahan baku yang ada di sekitar masyarakat dan terjangkau seperti sayur-mayur, buah-buahan, dan sumber protein lainnya. Pengembangan menu makanan ini dilakukan secara programatik dengan membuat pelatihan-pelatihan bagi masyarakat dengan menciptakan varian-varian rasa makanan yang beragam guna menciptakan minat makan anak dengan komposisi gizi yang lengkap. Melalui program inilah masyarakat mendapat kemudahan dalam memenuhi gizi anak, sehingga potensi kemunculan anak pengidap stunting dapat dicegah dan melahirkan anak-anak sehat dan bertumbuh secara optimal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Bilebante berikut ini:

“Mereka diajarkan cara mengolah makanan yang sehat dan bergizi yang langsung dipraktekkan ketika sosialisasi. Kalau dulu paling dibelikan telur dan sebagainya, kalau sekarang kan edukasinya langsung diberikan cara

membuatnya. Nah ketika program Kelas Ibu Hamil ini berakhir (ketika ibu itu melahirkan) maka program selanjutnya seperti PMP ini di mana mereka diberikan edukasi dan sebagainya, seperti edukasi pentingnya ASI. Masyarakat sangat bersyukur dengan adanya program ini karena masih ada pihak yang peduli terhadap mereka agar mereka bisa menjaga dan merawat anak dengan baik. Kelas Ibu Hamil itu masih berjalan sampai sekarang, setiap tahun kita programkan (wawancara tanggal 26 Juli 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa program penanganan stunting di Desa Bilebante dimaknai sebagai kepedulian pemerintah desa terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Kemampuan konsolidasi untuk menumbuhkan atensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sebuah program adalah bentuk keberhasilan pemerintah Desa Bilebante dalam merealisasikan program penanganan stunting di desanya. Partisipasi aktif masyarakat inilah yang mendukung percepatan penanganan isu stunting di Desa Bilebante karena melalui program edukasi, pelatihan, dan pendampingan oleh pemerintah desa dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat untuk mengenali, memahami, dan cara-cara ilmiah dalam mencegah potensi munculnya isu stunting dalam tumbuh kembang anak-anak mereka.

Kebijakan Penanganan stunting berbasis keagamaan

Masyarakat pedesaan merupakan kelompok atau komunitas yang menjadikan muatan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, dan istiadat sebagai tuntunan utama dalam menjalani kehidupan. Melihat realitas tersebut, Pemerintah Desa Bilebante melakukan inovasi penanganan stunting di Desa Bilebante dengan melakukan regulasi kebijakan, yaitu menjadikan ruang-ruang dan momentum keagamaan sebagai media untuk memberikan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya stunting dan cara mencegahnya. Salah satu momentum keagamaan yang difungsikan adalah kegiatan khutbah sholat jumat, melalui momentum inilah para tokoh agama menyampaikan kepada masyarakat tentang isu stunting sebagai ancaman baru yang harus ditangani dengan baik. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Pemerintah Desa Bilebante berikut ini:

“Tokoh agama kadang-kadang menyampaikan sosialisasi melalui mimbar khotbah. Kami di sini memang kalau ada rumusan dari pemerintah kabupaten untuk disampaikan di khutbah jumat. Ketika hari kesehatan ya disampaikan tentang kesehatan di khutbahnya, bahkan di kabupaten lombok tengah dalam sebulan ada dua kali pemerintah memberikan isi khutbah untuk disampaikan (oleh khatib). Dan ini cukup didengar oleh masyarakat, karena memang bagus juga program lombok tengah ini karena memang marbitnya juga sudah dianggarkan, mereka dapat honor tiap bulan dari pemerintah kabupaten. Sehingga takmir masjid wajib menyampaikan kepada petugas jumat untuk menyampaikan tema-tema seperti kesehatan untuk menangani masalah seperti stunting, ada materi di dalamnya. Nanti ketika para suami ini pulang dari jumat akan disampaikan ke istri-istrinya terkait materi yang disampaikan, ibu-ibu juga bisa mendengar khutbah itu karena suaranya kan besar. Nah kalau terkait peran tokoh adat juga sama, karena antara tokoh adat dan agamanya juga bisa dipegang oleh satu orang, kebanyakan seperti itu. Di Bilebante penghulunya bisa jadi tokoh adat bisa jadi khatib, kebanyakan seperti itu.” (wawancara tanggal 25 Juli 2023).

Pemanfaatan momentum keagamaan dalam penanganan stunting di Desa Bilebante berimplikasi positif terhadap tumbuhnya kesadaran di kalangan masyarakat tentang isu stunting. Proses sosialisasi yang dikemas dalam bentuk narasi keagamaan membuat masyarakat menilai masalah stunting sebagai perintah agama yang harus dijalankan. Hal inilah yang membuat masyarakat tergerak melakukan tindakan-tindakan pencegahan

stunting yang tergambarkan dari spirit masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengikuti program-program penanganan stunting yang dikembangkan oleh pemerintah desa.

Akumulasi programatik yang dikembangkan pemerintah desa mampu menciptakan kesadaran kolektif ditengah-tengah masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat dan bahaya stunting berbasis pemahaman ilmiah. Hal ini mengikis habis wawasan lokalitas tentang pola asuh anak yang sebelumnya terus diwariskan dari generasi ke generasi. Munculnya fasilitas-fasilitas kesehatan di tingkat desa mampu menutup praktik-praktik tradisional terkait pola asuh anak dan digantikan oleh wawasan ilmiah terkait pola asuh anak yang tepat dan ideal. Pada akhirnya, kebijakan-kebijakan berbasis bukti melalui implementasi program-program penanganan stunting oleh Pemerintah Desa Bilebante mampu berperan dalam mentransformasi wawasan pola asuh anak berbasis wawasan lokalitas dengan wawasan ilmiah berbasis kesehatan atau standar medis.

Rekomendasi Kebijakan dari Penanganan Stunting di Desa Bilebante

Berdasarkan uraian pembahasan terkait keberhasilan pemerintah Desa Bilebante dalam mengakselerasi penanganan stunting pada masyarakatnya sangat dipengaruhi oleh karakteristik modal sosial dan skema programatik yang dikembangkan pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan stunting. Melalui hal tersebut, dapat diambil suatu pembelajaran baik yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi-rekomendasi kebijakan penanganan stunting dalam cakupan yang lebih luas. Berikut ini adalah rekomendasi kebijakan penanganan stunting yang didapatkan dari keberhasilan penanganan stunting di Desa Bilebante:

Ketahanan pangan sehat dan bergizi melalui pembentukan program Dapur Sehat berbasis Sumber Daya Lokal

Data dari Direktorat Gizi Masyarakat Kemenkes tahun 2020 menunjukkan bahwa faktor utama dari stunting adalah kurangnya akses masyarakat ke makanan bergizi, dalam arti makanan bergizi masih dianggap mahal bagi masyarakat menengah ke bawah atau sulitnya mencari makanan bergizi bagi masyarakat yang tinggal di daerah 3T serta minimnya edukasi baik pemahaman dan pengetahuan terhadap jenis makanan bergizi (Widiyanty, Saimi, dan Khalik 2021; Nurbaiti et al. 2021). Maka dalam rangka menanggulangi anak stunting dan menciptakan masyarakat dengan gizi yang baik, diperlukan kebijakan dalam ketahanan pangan sehat dan bergizi, melalui pembentukan Dapur Sehat Atasi Stunting yang dilaksanakan oleh seluruh pemerintah desa, melalui pengembangan kelompok atau kelembagaan lokal, sebagai upaya pemenuhan gizi seimbang bagi masyarakat dengan pemanfaatan sumberdaya lokal. Memanfaatkan sumber daya lokal dengan mempertimbangkan nilai gizi dan nilai ekonomis yang terjangkau dapat mendorong antusiasme dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi komposisi gizi yang dibutuhkan anak-anak mereka.

Adapun tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk menyediakan sumber pangan sehat dan padat gizi untuk masyarakat, mengolah dan mendistribusikan makanan tambahan bernutrisi seimbang dengan mengembangkan varian menu makanan sehat yang ramah anak, memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan pangan sehat bergizi, memberikan konsultasi, informasi, edukasi gizi dan pelatihan keterampilan kepada masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan stunting, serta mendorong munculnya kelompok usaha keluarga dan masyarakat yang berkelanjutan di tingkat lokal. Hasil yang diharapkan dari kebijakan ini, yaitu terpenuhinya gizi pada masyarakat, diperolehnya pengetahuan dan keterampilan penyediaan pangan sehat dan bergizi, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan gizi yang baik maupun keterlibatan dalam kelompok usaha yang berkelanjutan sehingga salah satunya dapat meningkatkan pendapatan.

Edukasi dan Pendampingan Intensif kepada Remaja (calon pengantin) melalui Pembentukan Kader Posyandu Muda

Remaja dianggap sebagai pintu gerbang masuk pada kasus stunting, berdasarkan data ketika seorang remaja usia (15-19 tahun) menikah di usia < 20 tahun lalu memiliki kondisi asupan makanan kurang, kurus atau melakukan diet ketat, perokok, kurang zat gizi serta anemia, maka remaja tersebut akan membawa kondisi buruknya ini, sampai pada saat menikah, selanjutnya hamil hingga melahirkan anak yang stunting (Laporan Nasional Riskesdas 2018; Maryanti, Suprihatiningsih, dan Mubarak 2023; Irwansyah, Ismail, dan Hakimi 2016). Oleh karena itu, remaja (calon pengantin) akan mendapatkan pendampingan secara intensif oleh kader-kader posyandu muda yang rentang usianya tidak jauh berbeda dengan mereka, sehingga jalannya komunikasi dan sosialisasi dalam proses pendampingan dapat berjalan secara efektif dan kondusif. Kader-kader posyandu muda nantinya akan diberikan pembekalan dan peningkatan kapasitas dengan muatan keilmuan yang mumpuni dan relevan dengan kebutuhan pendampingan yang akan dilakukan. Pendampingan secara intensif kepada remaja (calon pengantin) oleh kader-kader posyandu muda dapat menutup potensi-potensi munculnya stunting pada pasangan muda yang menjadi kelompok rentan penyumbang stunting di Indonesia.

Pembentukan Satgas Stunting untuk Pendampingan Kelompok Rentan Secara Intensif

Sumber utama dari stunting adalah ibu hamil dengan kondisi anemia dan kekurangan gizi serta ibu melahirkan di usia < 20 tahun, yang mana berisiko melahirkan bayi prematur kurang dari 37 minggu atau bayi dengan berat badan lahir rendah < 1,5 kg. Intervensi pada ibu hamil dan ibu menyusui sangat dibutuhkan melalui pemeriksaan kondisi janin pada ibu hamil, hingga pemantauan ibu melahirkan dalam kondisi bayi yang sehat oleh tenaga kesehatan terlatih. Untuk Baduta dan Balita harus ikut dipantau perkembangannya, yaitu berat badan dan tinggi badan, pemberian ASI eksklusif selama 2 tahun, pemberian MP-ASI, tingkat kehadiran di posyandu, pemberian imunisasi lengkap, dan terdaftar di PAUD, sehingga apabila semua tahapan ini dilaksanakan maka anak dengan kondisi stunting dapat ditanggulangi (Prahastuti 2020; Nisa 2018; Zulkarnaen dan Soesilo 2021; Aryastami, N. K., & Tarigan 2017).

Pembentukan satgas stunting adalah bentuk pengorganisasian penanggulangan stunting yang difungsikan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengenali, memahami, dan memberikan tindakan terhadap potensi stunting yang menasar kelompok-kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, ibu bayi dua tahun, dan ibu bayi lima tahun. Kelompok tersebut membutuhkan pendampingan secara intensif dan responsif, sehingga keberadaan satgas stunting yang nantinya akan didekatkan dengan kehidupan masyarakat melalui pembentukan pos-pos titik strategis yang menyesuaikan dengan lingkungan masyarakat. Melalui satgas stunting, masyarakat akan mendapatkan kemudahan untuk berkonsultasi dan mengadukan permasalahan yang dihadapi mulai dari masa kehamilan dengan kemudahan akses dan tingkat responsivitas yang tinggi guna terciptanya percepatan penanganan indikasi masalah stunting yang ada.

Kolaborasi Multi Pihak Berbasis Modal Sosial

Modal sosial merupakan sekumpulan nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang memiliki nilai intervensi terhadap jalannya kehidupan bermasyarakat. Masing-masing daerah dan kawasan memiliki modal sosial yang berbeda menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat yang berperadaban di dalamnya. Mendalami karakteristik modal sosial yang ada di masyarakat dapat dijadikan media dalam mensosialisasikan dan mengedukasi tentang stunting kepada masyarakat dengan menyesuaikan dengan nilai-nilai modal sosial yang ada. Salah satu modal sosial yang umumnya ada di Masyarakat adalah nilai agama, nilai budaya, dan nilai sosial. Kemampuan untuk mengkolaborasikan sekumpulan nilai-nilai yang ada tersebut dapat

menciptakan alat intervensi yang efektif untuk menjalankan program-program penanganan stunting yang akan dilakukan.

Penggunaan Anggaran / Pendanaan berbasis Program Tepat Guna

Ketersediaan anggaran tidak cukup ditujukan hanya untuk merealisasikan sebuah program atau pembangunan saja, melainkan dibutuhkan pengkajian secara spesifik, pemetaan masalah, kebutuhan, dan potensi yang dijadikan acuan dalam merumuskan sebuah kebijakan. Stunting merupakan masalah sistemik yang membutuhkan rancangan sistem yang kuat dan tepat guna, sehingga melandaskan penggunaan anggaran berbasis program tepat guna yang didapatkan dari proses pengkajian realitas dan fenomena sosial dapat menciptakan percepatan penanganan stunting kedepannya.

Data dari Kementerian PPN/Bappenas (2018) menunjukkan bahwa untuk menurunkan kasus stunting membutuhkan anggaran yang jumlahnya relatif besar, seperti untuk pembangunan, perbaikan fasilitas akses air bersih, sanitasi dan fasilitas Kesehatan (puskesmas, posyandu), yang mana salah satu faktor penyebab terjadinya stunting berdasarkan Laporan Nasional Riskesdas (2018) adalah keluarga yang masih memiliki tempat BAB di ruang terbuka, kurangnya akses air bersih, dan sanitasi yang tidak memadai. Selain fasilitas tersebut, pendanaan pun juga dibutuhkan dalam hal membantu perbaikan gizi untuk keluarga yang berisiko stunting (remaja, ibu hamil, baduta, balita). Oleh karena itu, anggaran menjadi bagian terpenting dalam menciptakan pembangunan kualitas manusia yang sehat dan cerdas melalui penanggulangan kasus stunting di Indonesia.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

SIMPULAN

Penanganan stunting di Desa Bilebante di pelopori oleh pemerintah Desa Bilebante melalui pembentukan program-program yang disesuaikan dengan karakteristik dan modal sosial yang dimiliki masyarakat yang telah dipahami dan dialami sebagai acuan pembentukan program. Pemerintah Desa Bilebante membentuk beberapa kebijakan dan program penanganan stunting seperti, pembentukan dan peningkatan kapasitas kader posyandu muda, pelatihan ibu hamil, pelatihan pembuatan menu makanan sehat, kebijakan penanganan stunting berbasis kegiatan keagamaan, dan penggunaan anggaran secara optimal. Program dan kebijakan yang telah dilakukan mampu menurunkan angka stunting di Desa Bilebante dari persentase angka stunting yang sebelumnya di angka 23% menjadi 3,15% dalam waktu tiga tahun jalannya program. Kesuksesan program penanganan *stunting* di Desa Bilebante tidak terlepas dari kekuatan modal sosial yang dimiliki masyarakat berupa budaya tutur. Masyarakat Desa Bilebante memanfaatkan budaya tutur ini sebagai media pertukaran informasi, salah satu informasi yang dikembangkan terkait masalah *stunting* yang membahayakan bagi tumbuh kembang anak-anak mereka.

REKOMENDASI

Strategi yang dikembangkan pemerintah desa di Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah sudah menunjukan pembentukan sistem pembangunan masyarakat yang efektif yaitu dengan menghubungkan kepemilikan modal sosial dengan pengembangan model penanganan stunting berbasis kebijakan dan programatik. Bersamaan dengan itu, strategi yang dikembangkan memiliki ketergantungan yang kuat dengan keberadaan modal sosial dan karakteristik masyarakatnya yang memiliki potensi terjadinya perubahan kedepan, sehingga dibutuhkan upaya yang serius untuk mempertahankan nilai-nilai yang telah ada sebelumnya dan beradaptasi dengan perubahan yang ada untuk disesuaikan kembali dengan kebijakan dan program-program yang akan dikembangkan selanjutnya. Selain itu, dibutuhkan regenerasi tata kelola kader yang tersistem dengan baik untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan dari keberhasilan pembangunan yang telah dicapai selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Almitha, Scholastica Nadya, and Hastarini Dwi Atmanti. 2022. "Analisis Efisiensi Teknis Penanganan Intervensi Stunting Di Indonesia." *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi* 3 (1). <https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.3646>.
- Aryastami, N. K., & Tarigan, I. 2017. "Kajian Kebijakan Dan Penanggulangan Masalah Stunting Di Indonesia." *Buletin Penelitian Kesehatan* 45 (4).
- Barrett, Lisa Feldman, Batja Mesquita, and Maria Gendron. 2011. "Context in Emotion Perception." *Current Directions in Psychological Science* 20 (5). <https://doi.org/10.1177/0963721411422522>.
- Ciabattari, Teresa. 2007. "Single Mothers, Social Capital, and Work-Family Conflict." *Journal of Family Issues* 28 (1): 34–60. <https://doi.org/10.1177/0192513X06292809>.
- Fitriani, Barangkau, Masrah Hasan, Ruslang, Eka Hardianti, Khaeria, Resti Oktavia, and Selpiana. 2022. "Cegah Stunting Itu Penting!" *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JurDikMas) Sosiosaintifik* 4 (2). <https://doi.org/10.54339/jurdikmas.v4i2.417>.
- Handayani, Sri, Yopi Suryatim Pratiwi, Yadul Ulya, Siskha Maya Herlina, and Nurul Fatmawati. 2023. "Pendidikan Kesehatan Faktor Penyebab Stunting." *Jurnal LENTERA* 2 (2). <https://doi.org/10.57267/lentera.v2i2.207>.
- Harau, Mitra. 2015. "Permasalahan Anak Pendek (Stunting) Dan Intervensi Untuk Mencegah Terjadinya Stunting (Suatu Kajian Kepustakaan) Stunting." *Jurnal Kesehatan Komunitas* 2 (5).
- Harian Kompas. 2023. "Cara Pemprov NTB Turunkan Angka Stunting", Edisi 11 Februari 2023. Diakses tanggal 2 November 2023.
- Harian Lombok Post. 2023. "35 Desa di NTB ini Langganan Krisis Air Bersih Setiap Musim Kemarau", Edisi 30 Maret 2023. Diakses tanggal 2 November 2023.
- Harian Radar Lombok. 2020. "Kasus Pernikahan Anak di NTB Masih Tinggi", Edisi 21 Mei 2023. Diakses tanggal 2 November 2023.
- Haskas, Yusran. 2020. "Gambaran Stunting Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis* 15 (2).
- Imawanto, Imawanto, Lelisari Lelisari, and Nurjannah S. 2021. "Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat." *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 5 (1). <https://doi.org/10.31764/jpmb.v5i1.6604>.
- Ipan, Haniny Purnamasari, and Evi Priyanti. 2021. "Collaborative Governance Dalam Penanganan Stunting." *Kinerja* 18 (3).
- Irwansyah, Irwansyah, Djauhar Ismail, and Mohammad Hakimi. 2016. "Kehamilan Remaja Dan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 6-23 Bulan Di Lombok Barat." *Berita Kedokteran Masyarakat* 32 (6). <https://doi.org/10.22146/bkm.8628>.
- Kemnterian Kesehatan. 2022. "Faktor-Faktor Penyebab Stunting Pada Balita." *Kemkes*.
- Khairani. 2020. "Situasi Stunting Di Indonesia." *Jendela Data Dan Informasi Kesehatan* 208 (5).
- Kemenkes RI. (2018). Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta
- Kementerian PPN/ Bappenas (2018) 'Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota', Rencana Aksi Nasional dalam Rangka Penurunan Stunting: Rembuk Stunting, (November), pp. 1–51. Available at: <https://www.bappenas.go.id>.

- Lange, Jens, Marc W. Heerdink, and Gerben A. van Kleef. 2022. "Reading Emotions, Reading People: Emotion Perception and Inferences Drawn from Perceived Emotions." *Current Opinion in Psychology*. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2021.06.008>.
- Laporan Nasional Riskesdas (2018) 'Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf', Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, p. 198. Available at: http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf.
- Luthfiah, Fifi, and Susilo Wirawan. 2020. "Enrichment Opak Kelor Ikan Modifikasi Dan Dampaknya Pada Anak Stunting Di Kabupaten Lombok Utara." *Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal)* 5 (1). <https://doi.org/10.32807/jgp.v5i1.169>.
- Maad, Husnul, and Triyanti Anugrahini. 2022. "Bentuk Dan Peran Kapital Sosial Dalam Percepatan Penurunan Stunting Di Desa Pandawangi, Lombok Timur." *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 3 (2). <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v3i2.45>.
- Maliga, Iga, Herni Hasifah, Gladeva Yugi Antari, Rafi'ah Rafi'ah, and Ana Lestari. 2022. "Pengaruh Indeks Risiko Sanitasi Terhadap Kejadian Stunting Di Kecamatan Moyo Utara." *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia* 21 (1). <https://doi.org/10.14710/jkli.21.1.50-58>.
- Maryanti, Dwi, Trimeilia Suprihatiningsih, and Zulfikar Yusya Mubarak. 2023. "Inovasi Elektronik Stunting Prevention Mobile Education (E-Supreme) Untuk Remaja Tahun 2022." *Abdimas Mandalika* 3 (1). <https://doi.org/10.31764/am.v3i1.16861>.
- Nasikhah, Roudhotun, and Ani Margawati. 2012. "Prevalensi Stunting Di Jawa Tengah Kejadian Tertinggi Di Kecamatan Semarang Timur." *Journal of Nutrition College* 1 (1).
- Nirmalasari, Nur Oktia. 2020. "Stunting Pada Anak : Penyebab Dan Faktor Risiko Stunting Di Indonesia." *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming* 14 (1).
- Nisa, Latifa Suhada. 2018. "Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia". *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 13 (2).
- Nurbaiti, L, N Taslim, M Hatta, and A Bukhari. 2021. "Evaluation of Feeding Practices for Infants and Children (PMBA) for Stunting Children in Lombok." *Annals of the Romanian Society for Cell Biology* 25 (1).
- Nurhayati, Asmawati, Syirril Ihromi, Marianah, and Adi Saputrayadi. 2020. "Penyuluhan Gizi Dan Pelatihan Pengolahan Produk Berbasis Jagung Sebagai Upaya Meminimalisir Stunting Di Desa Labuapi Kabupaten Lombok Barat." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 4 (5).
- Oktia, Nur, Nirmalasari Dokter, and Relawan Bsmi. 2020. "QAWWAM: Journal For Gender Mainstreaming Stunting Pada Anak: Penyebab Dan Faktor Risiko Stunting Di Indonesia." *Qawwam* 14 (1).
- Prahastuti, Brian Sri. 2020. "Kajian Kebijakan: Kemitraan Publik Swasta Penanggulangan Stunting Di Indonesia Dalam Kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 12 (1). <https://doi.org/10.37012/jik.v12i1.124>.
- Prinz, Jesse, and Perhaps James. 2003. "Emotions Embodied." *Perception*.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. 2020. "Situasi Stunting Di Indonesia." *Jendela Data Dan Informasi Kesehatan* 208 (5).
- Putnam, By Robert D. 1993. "Social Capital and Public Life." *The American Prospect* 4.
- Raden, Agung Lestanto Notoesoediro, and Dinda Dea Pramaputri. 2021. "Analisis Biplot atas Kinerja Pemerintah dalam Penanganan Stunting di Indonesia." *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)* 3 (1). <https://doi.org/10.33827/akurasi2021.vol3.iss1.art101>.
- Rahman, Hardiyanto, Mutia Rahmah, and Nur Saribulan. 2023. "Upaya Penanganan Stunting di Indonesia: Analisis Bibliometrik Dan Analisis Konten." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* VIII (01).

- Sari, Indah Komala, Aniqoh Raudlatul Wardah, and Dwi Linna Suswardany. 2020. "Karakteristik Orang Tua Pada Bayi Stunting Usia 6-24 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Selo Kabupaten Boyolali." *Urecol*.
- Siregar, Sri Henny, and Albiner Siagian. 2021. "Hubungan Karakteristik Keluarga Dengan Kejadian Stunting Pada Anak 6 – 24 Bulan Di Kabupaten Langkat." *Tropical Public Health Journal* 1 (1). <https://doi.org/10.32734/trophico.v1i1.6049>.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. In *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Koleksi Buku UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang.
- Susilawati, Susilawati, and Sheila Oktaviani Br Ginting. 2023. "Faktor-faktor Resiko Penyebab Terjadinya Stunting pada Balita Usia 23-59 Bulan." *IJOH: Indonesian Journal of Public Health* 1 (1). <https://doi.org/10.61214/ijoh.v1i1.69>.
- Taufiq, Muhammad, Petrus Natalivan Indradjati, Suhirman Suhirman, and Benedictus Kombaitan. 2019. "Menemukan Kembali Pembaruan Perkotaan Berbasis Pengembangan Masyarakat: Studi Penanganan Pemukiman Kumuh di Perkotaan Indonesia." *TATALOKA* 21 (4). <https://doi.org/10.14710/tataloka.21.4.649-659>.
- Teja, Mohammad. 2019. "Stunting Balita Indonesia Dan Penanggulangannya." *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XI* (22).
- Ville, Arlette S. Saint, Gordon M. Hickey, and Leroy E. Phillip. 2017. "How Do Stakeholder Interactions Influence National Food Security Policy in the Caribbean? The Case of Saint Lucia." *Food Policy* 68. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2017.01.002>.
- Wardani, Zenderi, Dadang Sukandar, Yayuk Farida Baliwati, and Hadi Riyadi. 2021. "Sebuah Alternatif: Indeks Stunting Sebagai Evaluasi Kebijakan Intervensi Balita Stunting di Indonesia." *GIZI INDONESIA* 44 (1). <https://doi.org/10.36457/gizindo.v44i1.535>.
- Widiyanty, Hafsa, Saimi Saimi, and Lalu Abdul Khalik. 2021. "Pengaruh Pemberdayaan PMBA Terhadap Kesadaran Kritis Keluarga Balita Stunting Di Kabupaten Lombok Tengah." *Jurnal Keperawatan* 13 (3). <https://doi.org/10.32583/keperawatan.v13i3.1348>.
- Yuana, Nelly, Ta Larasati, and Khairun Nisa Berawi. 2021. "Analisis Multilevel Faktor Resiko Stunting Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesehatan* 6 (2).
- Yusuf, Wahyu Hidayat. 2022. "Faktor Resiko Stunting Di Nusa Tenggara Barat (NTB), Indonesia." *RCS Journal* 2 (1).
- Zulkarnaen, Zulkarnaen, and Nining Indroyono Soesilo. 2021. "Determinan dan Kebijakan Penanganan Stunting di Indonesia." *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 14 (1). <https://doi.org/10.33701/jppdp.v14i1.1497>.

